DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: PANJANGREJO Kecamatan: PUNDONG Kabupaten: KAB. BANTUL

Provinsi: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bulan: 6 Tahun: 2025

Nama Pengisi: JOKO IRIANTO, SE Pekerjaan: PNS Jabatan: Sekretaris Desa Kepala Desa / Lurah: MUDIYANA

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : KARTU C1 Referensi 2: DDK Referensi 3: DUKU REGISTER DESA Referensi 4: DATA DARI DUKUH

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi

Hasil Produksi

Nilai produksi (Rp)

I. PERKEMBANGAN KEI	PENDUDUKAN						
A. Jumlah Penduduk							
 Jumlah					Jeni	is Kelamin	
					Laki-laki Pe		Perempuan
Jumlah penduduk tahur	n ini				4740 orang 49		
Jumlah penduduk tahur	n lalu				4658 orang 4905 or		
Persentase perkemban	gan					1.76 %	0.88 %
B. Jumlah Keluarga							
Jumlah			KK L	aki-laki	KK P	KK Perempuan Jumlah	
Jumlah Kepala Keluarga	a tahun ini		27	791 KK		787 KK	3578 KK
Jumlah Kepala Keluarga			2.	711 KK		781 KK	3492 KK
Prosentase Perkemban				2.95 %		0.77 %	
II. EKONOMI MASYARA	KAT						
A. Pengangguran							
1. Jumlah angkatan ker	ja (penduduk usia 18	3-56 tahun)			0 orang		
2. Jumlah penduduk us					0 orang		
3. Jumlah penduduk us			ı tangga		2986 orang		
4. Jumlah penduduk us					0 orang		
5. Jumlah penduduk us					0 orang		
6. Jumlah penduduk us			kerja		0 orang		
7. Jumlah penduduk us	ia 18-56 tahun yang	cacat dan bekerja			0 orang		
B. Kesejahteraan Kelua	 irga						
1. Jumlah keluarga pras					555 keluarg	ja	
2. Jumlah keluarga sejahtera 1				464 keluarg			
3. Jumlah keluarga seja	htera 2				867 keluarga		
4. Jumlah keluarga seja	htera 3				1023 keluarga		
5. Jumlah keluarga seja	htera 3 plus				109 keluarga		
6. Total jumlah kepala keluarga				3018 keluarga			
III. PRODUK DOMESTIK	DESA/KELURAHAN	BRUTO					
A. SUBSEKTOR PERTAI	NAIN						
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
B. SUBSEKTOR PERKEE	3UNAN						
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

Nilai Bahan Baku yg

digunakan (Rp)

Nilai Bahan Penolong yg

digunakan

Jumlah Ternak

(Ekor)

Daging		0	45000	0	(Rp) 0	
). SUBSEKTOR PERIKANAN						
5. SUBSERTOR FERIRAINAIN				Nilai Bahan Penolong	Total hiava antara	
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	yg digunakan	yang dihabiskan	Jenis usaha perikanan
	(TOTI) Taridity		digunakan (Np)	(Rp)	(Rp)	perikariari
. SEKTOR PERTAMBANGAN	DAN GALIAN					
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong ya					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihab					Rp. 0,00	
Jumlah total jenis bahan taml	bang dan galian yang	ada			0 jenis	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 5.000.000	0.00
Total nilai bahan baku yang di	gunakan				Rp. 1.500.000	
Total nilai bahan penolong yai					Rp. 500.000,0	
Total biaya antara yang dihab					Rp. 3.000.000	0,00
Total jenis kerajinan rumah ta	ngga				5 jenis	
O OFI/TOD WINUSTER TO	N. ALIANI					
G. SEKTOR INDUSTRI PENGC G.1. Industri Pengolahan Mig						
G. I. Industri Pengolanan Mig Total nilai produksi tahun ini	as				Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di	gunakan				Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong ya					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihab					Rp. 0,00	
Total jumlah jenis industri tsb	yang ada				0 jenis	
G.2. Industri Pengolahan Nor	Migas					
Total nilai produksi tahun ini	au malian				Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di Total nilai bahan penolong ya					Rp. 0,00 Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihab					Rp. 0,00	
Total jumlah jenis industri tsb					0 jenis	
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang di Total nilai bahan penolong ya					Rp. 0,00	
Total hiiai bahan pendidng yai Total biaya antara yang dihab					Rp. 0,00	
Total blaya amara yang amab	ionari				110.0,00	
I. SEKTOR PERDAGANGAN, F	HOTEL DAN RESTORA	۸N				
I.1. Subsektor Perdagangan E	Besar					
Total nilai transaksi					Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan y					Rp. 0,00	
Total jumlah jenis perdaganga Total nilai biaya yang dikeluar					Rp. 0,00	
Total hilal biaya yang dikeluar Total biaya antara lainnya	Kan				Rp. 0,00 Rp. 0,00	
					1,47,0,00	
I.2. Subsektor Perdagangan E	Eceran					
Jumlah total jenis perdaganga	an eceran				14 jenis	
Total nilai transaksi					Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluar					Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan e	eceran				Rp. 0,00	
10 Och cele 11 c t						
.3. Subsektor Hotel	nonvodicen elem	noi vana ada			O ionio	
Jumlah total penginapan dan Jumlah total pendapatan	penyediaan akomoda	asi yang ada			0 jenis Rp. 0,00	
Jumian totai pendapatan Jumlah total biaya pemelihara	aan				Rp. 0,00	
Jumlah biaya antara yang dike					Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang					Rp. 0,00	

Jumlah tempat penyediaan konsumsi	0 Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00
J. Sektor Bangunan/Konstruksi	
Jumlah bangunan yang ada tahun ini	2989 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 0,00
Biaya antara lainnya	Rp. 0,00
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	
K.1. Subsektor Bank	
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	1 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	0 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	0 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	0 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	0 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
,-,-,	. 4 7
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
ν - ν· σ· · · · ·	E
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	2 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan	
sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

N.1. Subsektor Listrik			
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik		0 Jenis	
Jumlah nilai produksi listrik		Rp 0,00	
Jumlah total nilai transaksi		Rp 0,00	
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan		Rp 0,00	
N.2. Subsektor Gas			
Jumlah kegiatan penyediaan gas		0 jenis	
Nilai aset produksi gas		Rp 0,00	
Nilai transaksi		Rp 0,00	
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp 0,00	
N.3. Subsektor Air Minum			
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum		0 jenis	
Nilai aset penyediaan air minum		Rp 0,00	
Nilai produksi air minum		Rp 0,00	
Nilai transaksi air minum		Rp 0,00	
Biaya antara yang dikeluarkan		Rp 0,00	
IV. PENDAPATAN PERKAPITA			
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha			
A.1. Kerajinan			
1. Jumlah rumah tangga		0 Keluarga	
2. Jumlah total anggota rumah tangga		0 orang	
3. Jumlah rumah tangga buruh tani		0 Keluarga	
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh		0 orang	
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga		Rp 0,00	
D. DENDADATAN DILL KELHADOA			
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA			
Jumlah Kepala Keluarga		168 KK	
Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga		6027 orang	
Jumlah pendapatan kepala keluarga Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja		Rp 0,00 Rp 0,00	
Julillan pendapatan dan anggota keluarga yang bekerja		κρ 0,00	
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR			
1. Sektor Pertanian			
Petani Z	2 oran	ng	
Buruh Tani f	1993 (orang	
Pemilik Usaha Tani	220 or	orang	
2. Sektor Perkebunan			
) oran	ng	
·	oran	rang	
Pemilik usaha Perkebunan (oran	ang	
3. Sektor Peternakan			
Peternakan Perorangan 0 ora		<u> </u>	
Buruh Usaha Peternakan 0 ora			
Pemilik Usaha Peternakan 107 d		orang orang	
4. Sektor Perikanan			
·	oran	<u> </u>	
Buruh Usaha Perikanan 0 oran Pemilik Usaha Perikanan 0 oran		<u> </u>	
PETHIIK USAHA PEHKAHAH) oran	пу	
5. Sektor Kehutanan			
) oran	na	
* 1	oran	-	
	oran	-	
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C			
	oran		
-	oran		
Pemilik Usaha Pertambangan (oran	ng	

7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga		
8. Sektor Industri Menengah dan Besar		
·		
9. Sektor Perdagangan		
	0	
	0 orang	
	0 orang	
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	0 orang	
10. Sektor Jasa		
Pegawai Negeri Sipil	159 orang	
<u> </u>	6 orang	
Pensiunan PNS	169 orang	
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT		
A. ASET TANAH		
Tidak memiliki tanah	-	1 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha		1 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha		1 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha		1 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha		2 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha		0 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha		3 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha		0 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha		0 orang
Jumlah total penduduk		12 orang
ournan total periodual		12 Grang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM		
Memiliki becak		4 orang- 3 unit
Memiliki bus	(3 orang- 8 unit
C. ASET SARANA PRODUKSI		
Memiliki penggilingan padi		10 orang
Memiliki traktor		20 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian		3 orang
Memiliki kapal penangkap ikan		0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan		0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan		0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan		0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata		0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan		0 orang 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah		0 orang 0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah masil industri kerajiran kerdanga skala kecil dan menengan Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas		0 orang 0 orang
Intermina diat produksi dan pengolahan hasil industri migas		o orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING		
Tembok		2989 rumah
RUMAH MENURUT LANTAI		
Keramik		2989 rumah
DUMALI MENUDUT ATAD		
RUMAH MENURUT ATAP		0000
Genteng		2989 rumah
Asbes		1 rumah
AVII DEMILIMANI ACET EMONIONI I AININYA		
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA		
Jumlah keluarga memiliki helikopter	-	0 Keluarga
раннан кенануа шеншки нешкортен		o Nelualya
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT		
=		
A. Tingkat Pendidikan Penduduk		
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin 65 orang		
oo ording		

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	211 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	50 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat	366 orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	459 orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	369 orang
Jumlah penduduk tidak tahat 35/3cderajat Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat	232 orang
Jumlah penduduk sedang SETT/sederajat Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	428 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat	88 orang
Jumlah penduduk sedang SETA/ sederajat Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat	231 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	877 orang
Jumlah penduduk tamat SETA/Sederajat Jumlah penduduk sedang D-1	0 orang
Jumlah penduduk sedang bil	3 orang
Jumlah penduduk tamat b 1 Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang 5-2 Jumlah penduduk tamat D-2	3 orang
Jumlah penduduk tamat b-2 Jumlah penduduk sedang D-3	
Jumlah penduduk sedang 5-5 Jumlah penduduk tamat D-3	10 orang 31 orang
Jumlah penduduk tamat b-5 Jumlah penduduk sedang S-1	51 orang 52 orang
Jumlah penduduk sedang 3-1 Jumlah penduduk tamat S-1	87 orang
Jumlah penduduk tamat 3-1 Jumlah penduduk sedang S-2	2 orang
Jumlah penduduk sedang 3-2 Jumlah penduduk tamat S-2	
Jumlah penduduk tamat S-2 Jumlah penduduk tamat S-3	6 orang
Jumlah penduduk tamat 5-5 Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A Jumlah penduduk tamat SLB A	7 orang
	1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	1 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C Jumlah penduduk tamat SLB C	1 orang
·	1 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	29 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	63 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	63 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang
C. Rasio Guru dan Murid	·
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	8 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	93 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	23 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	250 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	17 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	111 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	7 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	109 orang
9. Jumlah siswa SLB	15 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
,	4 1
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	
	1 unit
Jumlah perpustakaan keliling	1 unit 0 unit
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar	1 unit 0 unit 0 unit
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 rang 0 rang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 telompok 0 orang 0 unit
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 rang 0 rang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 telompok 0 orang 0 unit
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah lembaga kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 telompok 0 orang 0 unit
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket A Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang 34 orang 34 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	1 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah lembaga kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang 0 unit 0 orang
Jumlah perpustakaan keliling Jumlah sanggar belajar Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah Jumlah kelompok belajar Paket A Jumlah peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah Peserta ujian Paket B Jumlah kelompok belajar Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta ujian Paket C Jumlah peserta kursus keterampilan Jumlah peserta kursus keterampilan IX. KESEHATAN MASYARAKAT A. Kualitas Ibu Hamil Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 kegiatan 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 kelompok 0 orang 0 unit 0 orang 0 unit 0 orang

	00
Jumlah ibu hamil melahirkan	39 orang
Jumlah ibu nifas	39 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	39 orang
D. Kushkas Davi	
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	1 orang
Jumlah bayi lahir	39 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	39 orang
	-
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	1 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan	0
mental	0 orang
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	
	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	2 unit
Tempat praktek dokter	2 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	39 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	2 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	2 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	4 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	4 orang
, , ,	-
Jumlah bayi usia 4 bulan	5 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	5 orang
Jumlah bayi 9 bulan	3 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	3 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	24 orang
outhlan bays yang badan intanibabi babai	2 Foreing
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	404 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	2.306 orang
	-
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	1.306 pasangan
Keluarga Berencana	1
Jumlah akseptor KB	988 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	312 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	257 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	241 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	91 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	13 orang
	<u> </u>
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	51 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	23 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	318 orang
2 2 33 Jung daak manggunakan metede Ko	B
F. Wabah Penyakit	
Demam berdarah	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	6 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
ournan yang meninggai	o rejudian
-1	

G. Angka Harapan Hidup		
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0,00 Tahun	
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	73,90 Tahun	
Angka Harapan Hidup Provinsi	75,08 Tahun	
Angka harapan Hidup Nasional	70,80 Tahun	
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih		
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	1.892 Keluarga	
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	71 Keluarga	
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga	
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	869 Keluarga	
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga	
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga	
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga	
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga	
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga	
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di	0 Keluarga	
atas	0 Keluarga	
Total jumlah keluarga	2.832 Keluarga	
- Can Jan Han Haran ga		
I. Perilaku hidup bersih dan sehat		
Kebiasaan buang air besar		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	2.665 Keluarga	
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	0 Keluarga	
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	157 Keluarga	
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	1 Keluarga	
Pola makan		
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Ada	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak	
Kebiasaan berobat bila sakit		
Dukun Terlatih	Tidak ada	
Dukun Terlatih Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Tidak ada Banyak	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal	Banyak Tidak ada Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal	Banyak Tidak ada Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang 12 orang	Di rayat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang 12 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi kebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang 12 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi kebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang 12 orang Jumlah penderita	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang 12 orang Jumlah penderita	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi kebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang Jumlah penderita	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang Jumlah penderita 1 unit 16 unit 80 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 1 unit 16 unit 80 orang 0 orang 0 Dasawisma 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang 0 Dasawisma 0 orang 0 orang 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah kader Posyandu aktif Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah kader bina keluarga balita aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Rosyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi kebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Rosyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang Diisi Diisi	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah Dasawisma Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang Diisi Diisi Diisi	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 isi Diisi Diisi Diisi O jenis	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku administrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Buku administrasi Posyandu Buku administrasi Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 isi Diisi Diisi Diisi 0 jenis 0 jenis	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku daministrasi Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kader kesehatan lainnya Jumlah kader kesehatan lainnya	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku datan pelayanan Posyandu Buku datan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah McK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku kegiatan pelayanan Posyandu Buku daministrasi Posyandu lainnya Jumlah kegiatan Posyandu Jumlah kegiatan pengobatan gratis Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 385 orang 12 orang 1 unit 16 unit 80 orang 0 jenis 0 jenis 0 orang	Di rawat di
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif Paranormal Obat tradisional dari keluarga sendiri Tidak diobati J. Status Gizi Balita Jumlah Balita Jumlah Balita bergizi buruk Jumlah Balita bergizi baik Jumlah Balita bergizi kurang Jumlah Balita bergizi lebih K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini Jenis penyakit L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah MCK Umum Jumlah Posyandu Jumlah Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pembina Posyandu Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif Buku rencana kegiatan Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku data pengunjung Posyandu Buku datan pelayanan Posyandu Buku datan pelayanan Posyandu Buku administrasi Posyandu Jumlah kegiatan Posyandu	Banyak Tidak ada Tidak ada Sedikit Tidak ada 438 orang 2 orang 39 orang 12 orang 11 unit 16 unit 80 orang 0 orang	Di rawat di

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
A. Konflik SARA Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang 0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
B. Perkelahian	10.1
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus 0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
ournan pelaka komink yang diadin atau diproses secara nakam	0 ording
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setemp	oat 0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya	0 kasus
penduduk setempat	0
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	lo.
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Keluranan ini Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang 0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
odinian kasas sengketa wansan, jaar ben dan atang platang	Journal
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
_okalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali

H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
. Penculikan	l l
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	I
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	31 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental Jumlah orang cacat fisik	0 orang 125 orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang 0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	38 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	11 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	2 orang
Jumlah janda	0 orang
Jumlah duda	0 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/sederajat Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/sederajat	0 orang 0 orang
Jumlah anak usia 15-13 tahun yang tidak sekolah di SLTA/sederajat	0 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	787 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	9688 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang 0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang 0 orang
zarman marga penautung dan utau pekerja musiman	o orang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus 0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak ternadap orang tua Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
zamian kasas kekerasan kepala keluarya temauap anggota keluarya lalilitya	o vasus

M. Teror dan Intimidasi		
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan		0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan		0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan pendi	ıduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	<u> </u>	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat		0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum for	mal	0 kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta		
Organisasi Siskamling		Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat		Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamlimg/Pos Ronda		75 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas		16 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda		Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas		0 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta		0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah		0 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan		36 Pos
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT		
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara		
	0 jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 kegiatan	
, , , ,	3 jenis	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	3 kegiatan	
	3 jenis	
	3 kegiatan	
	0 kasus	
	0 orang	
0 7 0 1 0 00	0 orang	
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan	0 kasus	
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan	0 kasus	
perbatasan negara tetangga Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di	0 kasus	
desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok	0 kasus	
pengacau keamanan Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus	
desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus	
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus	
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus	
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus	
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus	
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus	
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan di kasus dan daratan wilayah negara lain		
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi		
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis	
Jumlah Wajib Pajak	11406 orang	
Target PBB	Rp 615.049.532	2.00
· ·	57,00 %	-,
	0 tindakan	
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 jenis	
	0 orang	
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00	
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %	
	0 jenis	
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00	
	0,00 %	
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus	
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus	
C. Partisipasi Politik		
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum		
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	0 orang	

Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	0 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	0 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	0 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	0 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Perhilu Legislatif yang lalu Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	8391 pemilih
Jumlan permin yang menggunakan nak pilin dalam perminan presiden/ wakii	
2 Damilihan Kanala Daarah	
Pemilihan Kepala Daerah Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	8232 orang
Jumlah penididuk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	0 pemilih
Jumlah penilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubenur yang lalu	0 pemilih
Surfillari perfilliri yang menggunakan nak piliri dalam perfilid Gubenur yang laid	О РЕПППП
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa Penantuan Jabatan Kepala Desa	Dipilih masyarakat secara langsung
r chentuan Jabatan Kepala Desa	Dipilit masyarakat secara langsung
	Diaming dispersed describes also
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
	Dapati, Walikota
Departues Decarded Decartermonals Kendle Dugus	
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	6 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	11 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa
	secara musyawarah dan mufakat
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara
	langsung
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	Peraturan Desa 0 buah Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali Rancangan Peraturan Desa. 0 buah Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali Menyampaikan besa 0 kali Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan	
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	0 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	0 unit organisasi
	Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala
Pemilihan pengurus LKD/LKK Pemilihan pengurus organisasi anggota	Desa/Lurah
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LKK
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	0 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
anggota EKD/EKK	0 kegiatan
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Tidak
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW,	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Tidak Ada
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada

sear dam intel tibliaritys drukkin organisais angepat LRDLKK plan administration in Kertarusanhan I. KOLIKK plan administration in Kertarusanhan I. Kolikkan Musyawarah Perencansan Perabanguanan Desa/Kelurahan Vasrenbangdes/ Kelurahan milah hinayawarah perencansan perabanguanan tingah diban Muserbang di disea dan kelurahan yang dibakkan pasa tahun ini, termasuk di tingistra unah keluraharan magarakan dalam seriap kalif musyawarah tingistra dusum/ingkungan dan desa-Kelurahan milah perena perenguan dalam Muserbang di cesa dan kelurahan yang dipudahan dalam perenananan perabanguanan desa-Kelurahan milah perena perenguan dalam Muserbang di cesa dan kelurahan yang dipudahan dalam perenananan perabanguanan desa-Kelurahan milah perena perenguan dalam Muserbang di cesa dan kelurahan yang dipudahan dalam perenanan perabanguanan desa-Kelurahan perenananan perabanguanan dalam perenguanan perabanguan perabanguan perabanguan perabanguan perabangan dan Muserbangan di an Muserbangan di an Muserbangan di an Muserbangan di an Muserbangan di andram dalam magarahan yang di desa-dan kelurahan sebagai bahan dalam Muserbangan di andram dalam magarahan yang di desa-dan kelurahan sebagai bahan dalam Muserbangan perabanguan perabanguan perabanguan perabangan per		
PERAMSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Augyarwanih Premonanan Probingrunan Desa/Keburahan/ Muserbangde/ Keburahan Augyarwanih Premonanan Probingrunan Ungaliz Desa/Ke ungay gridiblaksan pada tahun ini, termasuk di tingkat ja midih mengangan perambangunan tingkat Desa/Ke ungay gridiblaksan pada tahun ini, termasuk di tingkat ja midih perambangunan perambangunan perambangunan yang disebarkan pada dasam Maserbang di desa dari keburahan Malah perambangkan dalam Maserbang di desa dan keburahan (S000 %) Malah perambangkan Keburahan sebaga umber dari dasar yang digunakan dalam peremanan pembangunan desa dari yang gridiblaksan dari Maserbang di desa dan keburahan (S000 %) Malah perambangkan Keburahan sebaga umber dari dasar yang digunakan dalam pemenanan pembangunan desa dari yang manakan S600 mada sektora dalam pemenanan pembangunan perambangunan desa dari yang manakan S600 mada sektora dalam pemenanan pembangunan perambangunan desa dari yang manakan S600 mada sektora dalam pemenanan dari pemenanan pembangunan perambangunan desa dari yang manakan S600 mada sektora dalam pemenanan pembangunan perambangunan desa dari yang manakan S600 mada sektora dalam pemenanan dari pemenanan pembangunan perambangunan desa dari yang manakan S600 mada sektora dari pemenanan pembangunan perambangunan dalam Maserbang pembangunan dari pemenanan pembangunan dari keburahan pembangunan dari pemenanan pembangunan dari keburahan pembangunan dari keburahan dari pemenanan pembangunan pembangunan pembangunan dari keburahan dari pemenanan pembangunan pembangunan dari keburahan dari pemenanan pembangunan pem	Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi,	
PERANSERIA MASYKARAKT DALAM PEMBANGUNAN Wayawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan India mayawarah Perencanaan Pembangunan ingiat Desa/Kelurahan yang dilaksan pada tahun ini, termasuk di tingkal Jakusi Mandangan maganakal dalam selapa kali mayawarah tingkal dispurlingkungan dan cesa/kelurahan India berangan bala dalam Musrenbang cil dala dan kelurahan India peareta kelik dalam Musrenbang cil dala dan kelurahan India peareta kelik dalam Musrenbang cil dala dan kelurahan India peareta kelik dalam Musrenbang cil dala dan kelurahan India peareta kelik dalam Dalam dan pearetanaan pembangan yang disperdinaskan Kecamatan Spogusaan Profil Desa/Kelurahan sebaga umber cata dasar yang digunahan dalam peerenanaan pembangunan desa dan India Musrenbang dida pembangan pemenanaan pembangunan pertipotat fi dan Musrenbang dalam desa dan India pesareta yang disetujui menjad filemana Kena Desa dan Kelurahan India pembangan dalam pembangan pemenanaan pembangunan pertipotat fi dan Musrenbang partepati India Pembangan dalam pembangan pembangan pembangunan pembangunan pembangunan desa dan kelurahan dalam pembangan pembangunan desa dan kelurahan dalam pembangan pemban		
Augusvarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahary Musrenbangdea/ kelurahan Talah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat besa/Kelurahan yang dilakakan pada tahun ini, termasik di tingkat una una deningkungan di perencanaan pembangunan tingkat besa/Kelurahan yang dilakakan pada tahun ini, termasik di tingkat una una deningkungan di perencanaan pembangunan tingkat besa/Kelurahan Talah Martahan musyawarah dalam Musenbang di desa Makurahan Talah perencanakan Musenbang di desa dalah desa Makurahan Talah perencanakan Perencanakan di desa Makurahan di desa Makurahan di desa dalah Kelurahan Talah perencanakan Perencanakan perencanakan pembangunan parti pipat dian Musrenbang di desa dan Variahan Talah pembangkan di delam pembalahan dialam perencanakan pembangunan parti pipat dian Musrenbang di desa dan Kelurahan dialam perencanakan peren	geglatan administrasi dan ketatausanaan LKD/LKK	
Augusvarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahary Musrenbangdea/ kelurahan Talah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat besa/Kelurahan yang dilakakan pada tahun ini, termasik di tingkat una una deningkungan di perencanaan pembangunan tingkat besa/Kelurahan yang dilakakan pada tahun ini, termasik di tingkat una una deningkungan di perencanaan pembangunan tingkat besa/Kelurahan Talah Martahan musyawarah dalam Musenbang di desa Makurahan Talah perencanakan Musenbang di desa dalah desa Makurahan Talah perencanakan Perencanakan di desa Makurahan di desa Makurahan di desa dalah Kelurahan Talah perencanakan Perencanakan perencanakan pembangunan parti pipat dian Musrenbang di desa dan Variahan Talah pembangkan di delam pembalahan dialam perencanakan pembangunan parti pipat dian Musrenbang di desa dan Kelurahan dialam perencanakan peren		
milan musyawarah personanan pembangunan ingkat Desa/Kebrahan yang dikakukan pada tahun ini, termasuk di ingkat undari ingkat pun dari pingkangan dan desa/keburahan (100.00 %) milan kehadarian masyarakat dalam setap keli musyawarah tingkat dukur/lingkangan dan desa/keburahan (100.00 %) milan perseta kelik dia datam Muserebang di desa/keburahan (100.00 %) milan perseta perempuan dalam Muserebang di desa-keburahan (100.00 %) milan perseta perempuan dalam Muserebang di desa-keburahan (100.00 %) milan perseta perempuan dalam Muserebang di desa dan kelurahan (100.00 %) milan musyawakat dalam pertuakhan dalap perdi desa dan kelurahan kerja bera dan kelurahan kerja berakan kerja pergerih dan kelurahan dalam pertuakhan dan kerja berakan dan kelurahan kerja berakan kelurahan perkebangan kerja berakan kelurahan kel	C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	
um dan lingkungani maka keharan mengawakan dalam setak keli musyakarah tingkan disuru/ingkungan dan desa/kelushahan (0.000 %) milah keharan mengawakan dalam setak keli musyakarah tingkan disuru/ingkungan dan desa/kelushahan (0.000 %) milah Masyawarah Antar Dasa dalam perencanaman perencanam	I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan	
intigli Nethodian megyarakist dalam setap kali musyawash tinyakat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan (10,00 %) intigli pasersa laki kali dalam Muserenbang di desa/kelurahan (10,00 %) intigli pasersa laki kali dalam Muserenbang di desa dari kelurahan (10,00 %) intigli pasersa laki kali dalam Muserenbang di desa dari kelurahan (10,00 %) intigli pasersa permunjuan desa dari mini Augwarati hara Desa dalam perencansan permungunan desa dari mum farara Desa dalam pertencansan permungunan desa dari mum farara Desa dalam pertencansan permungunan desa dari mum farara Desa dalam pertencansan permungunan desa dari mum farara dalam persungunan desa dari mum farara dari pasersa dalam pertencansan permungunan desa dari mumbaran dari biS dari dari sekorah dalam persungunan partisipatif dan Muserenbang di desa dari dari dari dari dari dari dari dar	Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat	2 kali
midn besette permetan lakt-leide dalam Muserebang di desa dun kehurahan midn besette permetangan dalam perencanaan pembangunan yang dikocordinasikan kecamatan ganjuanan Profit Desarkelurahan sebaga samere dada dasay samer dada dasay yang digunakan dalam perencanaan pembangunan yang dikocordinasikan kecamatan ganjuanan Profit Desarkelurahan sebaga samere dada dasay yang digunakan dalam perencanaan permbangunan partieipatif dan Muserebang di desa dan yangunaan dara Bis dada data sekebari dislam perencanaan permbangunan partieipatif dan Muserebang di desa dan yangunaan dara Bis dada data sekebari dislam perencanaan permbangunan partieipatif dan Muserebang partieipatif yangunaan dara Bis dada data sekebari dislam perencanaan permbangunan partieipatif dan Muserebang partieipatif yangunaan dara Bis dada data sekebari dislam perencanaan permbangunan partieipatif dan Muserebang partieipatif yangunan dara Bis dada data sekebari dislam dalam permetan kebagahan dalam muserbang partieipatif yangunan dara Bis dasa dara kepagahan dalam kepagahan dalam Muserebang desarkelurahan dalam partieipatif dan Muserebang desirebang dalam permetan kebagahan dalam permetan kepagahan dalam permetan kebagahan dalam permetan dalam partieipatif dan Muserebang desirebang desir		100.00 %
millen Bester berempund dalam Muserebang di desa dan kelurahan (1900 %) rigiuman Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber dala dasar yang dipundan dalam perencanaan pembangunan dasa dan um Muserebang Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber dala dasar yang digundan dalam perencanaan pembangunan dasa dan um Muserebang Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber dala dasar yang digundan dalam perencanaan pertanggunan partisipal dari Muserebang di desa dari umban dalam perencanaan perencanaan perencanaan pertanggunan partisipal dari Muserebang partisipatif dari Muserebang partisipatif dari Muserebang partisipatif dari dari masyarakan yang dasahuja menjadi Rencana Kerja Desa dari Kelurahan dan dilam Muserebang partisipatif (1900 %) diam masyarakan yang disebujai menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dinuari dalam RAP9-Desa dan Kelurahan dari menarakan yang dalam pemerinah nigitat dalam perencanakan di desa dan kelurahan Kerpahangang dari dari partisipatif dari dalam menarakan yang dalam dalam perencana kerja dalam Muserebangsekel dalam terebang partisipatif dari dalam menarakan yang dalam dalam Muserebangsekel dalam perencana kerja Desa/Kelurahan (PRI/MK)O Adia dalam dalam dalam pemerinah nigitat sasa yang dalam dalam Muserebangsekel dalam dalam perencana kerja Desa/Kelurahan (PRI/MK)O Adia dalam dalam dalam pemerinah nigitat sasa yang dalam dalam Muserebangan dalam dal		<u>'</u>
rollar Musyawarah Aritar Desar dalam permonanan pembangunan yang dikondrinasian Kecamatan (gapunan Profile Des Aritarban) (2000 % yangunan Profile Des Aritarban) (2000 % yangunan Profile Des Aritarban) (2000 % yangunan dalam personanan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan untuk pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan untuk pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan kelurahan di batar masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif (2000 %) Jalam musyarakat yang disetipul menjadi Remanan Kerja Desarketurahan dan dimust dalam RAPB-Desa (2000 %) Jalam musyarakat yang disetipul menjadi Remanan Kerja Desarketurahan dan disetipatin dari pementah kabupatera katar yang dibaba dan dan kepistan dari pementah kabupatera katar yang diseba saat untuk didalam Jalam remanan kerja program dan kepistan dari pementah kabupatera katar yang diseba saat untuk didalam Jalam remanan kerja pemerinah tingkat atas yang diseba kelurahan (REMADK) (3000 %) Jalam remanan kerja pemerinah tingkat atas yang diseba kelurahan (REMADK) (3000 %) Jalam remanan Pembangunan Jangka Merempal Desarketurahan (REMADK) (3000 %) Jalam kabupatah (3000 %) Jalam	Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	<u>'</u>
uim Musernbarrig Partisipadif ground rata tas Roba on drata sektional dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musernbarrig di desa dan versiona betarn masyarakat dalam pemutakhiran data profit desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musernbarrig Data (1905) datan masyarakat yang disetipi menjadi Rencana Kerja Desa dari Kelurahan dan dimusat dalam RAPR-Desa dan kelurahan dan pemerintah pada kelurahan dan desa dari kelurahan dan kejatan dan pemerintah pada kelurahan dan desa dari kelurahan dan kejatan dan pemerintah kelupaten/kotarprovinsi dan pusat yang didahan ARPR-Desa dan kerupatan dan pemerintah kebapaten/kotarprovinsi dan pusat yang didahan dalam RAPR-Desa dan kelurahan delam RAPR-Desa dan kelurahan dan kejatan dan pemerintah kebapaten/kotarprovinsi dan pusat yang didahan dalam RAPR-Desa dan kelurahan dan kejatan dan pemerintah kebapaten/kotarprovinsi dan pusat yang didak dalam Musernbangdes/kel 0. kegiatan dan pemerintah tingkat atas yang didak dalam Musernbangdes/kel 0. kegiatan dan pemerintah tingkat atas untuk dibayai kebapat besa Kelurahan (RAPD-Now) dan ARP Norapus nationebaban avada yang tindak direalisasikan dalam APR-Desa dan Kelurahan (RAPD-Now) dan ARP Norapus nationebaban avada yang tindak direalisasikan dalam APR-Desa dan kelurahan yang diselukan yang	Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	50,00 %
um Musernöung Pertangang garang dan data sektoral dalam perencansan pembangunan partialpatif dan Musernöung di dasa dan variahan butahan masyarakat dalam pemutakhiran data profif dasa dan kehurahan sebagai bahan dalam Musernöung partisipatif Va batah masyarakat dalam pemutakhiran data profif dasa dan kehurahan sebagai bahan dalam Musernöung partisipatif Va batah masyarakat dalam pemutakhiran data profif dasa dan kekurahan batah pemanganan kerja pesa Melurahan dalam Musernöung partisipatif Va batah masyarakat dalam pemutakhiran dalam pembengan partisipatif Va batah masyarakat dalam pembengan partisipatif Va batah pasat yang dibahas saat dalam pembengan pemerintah kabupatera/katap provinsi dan pasat yang dibahas saat dalam pembengan pemerintah kabupatera/katap pemerintah tingkat satas yang diroks dalam Musernöung des/kel Musernõung pendapa pemerintah tingkat satas yang diroks dalam Musernöung des/kel Musernõung pendapa pen	Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan	Ya
urishan masyarakat dalam pemutakhiran data profit desa dan kalurahan sebagai bahan dalam Muserebang partisipatif (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%	<u> </u>	
Jalan masyarakari yang diseluju menjadi Renorana Kerja Desa dan Kelurahan Jan Pemerintah Indikat diaksanakan di desa dan kelurahan deleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Jan Pemerintah Indikat diaksanakan di desa dan kelurahan deleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Jan Pemerintah Indikat diaksanakan di desa dan kelurahan deleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Jan Pemerintah Indikat diaksanakan di desa dan kelurahan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan J	Kelurahan	Ya
Jan Penerintah Desa dan Kefurahan yang di setujui menjadi Renoana Kerja Desa Kefurahan dan dimuet dalam RAPB-Desa 19,00 % Jahar nenorak kerja pengam dan kejelariah dari penerintah kerjadi Penerintah Penerintah Kerjadi Penerintah Penerintah Penerintah Kerjadi Penerintah Penerintah Penerintah Penerintah Kerjadi Penerintah Pen	Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Jan recnan kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat serebang dan diseluju intik dibanasankan di desa dan kelurahan dih masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 20,00 % sarebang dan kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPO/K) Ada milikan dokumen Pencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPO/K) Ada milikan dokumen Pencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPO/K) Ada milikan dokumen Pembangunan Jangka Memengah Pesa/Kelurahan (RKPO/K) Ada milikan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Pesa/Kelurahan (RPJM/K) Ada milikan Rencana Pembangunan Jangka Memengah Pesa/Kelurahan (RPJM/K) Ada Maja Kelurahan APB Pembangunan Jangka Memengah Pesa-Kelurahan (RPJM/K) Ada Maja Kelurahan APB Pembangunan APB Pembangunan Jangka Kejatan yang disuklikan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan in Musrenbang disuklikan masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan milah masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan milah masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,00 % milah pedukuk yang dilabatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,00 % milah pedukuk yang dilabatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,00 % siskelurahan stu kabupeter/kota belam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,00 % siskelurahan stu kabupeter/kota belam pelaksanaan fisik di sesuai kerentuan dalam APB-Daerah 320,00 % siskelurahan sung dilaksan kabupater/kota dalam pelaksanakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksan masyarakat an desakelurahan di luar yang telah direncansakan dan disepakat masyarakat dalam APB-Daerah 33,00 % dalam pembangunan yang dilaksan kemagan pelaksanakan di luar yang telah direncansakan dan disepakat masyarakat dalam pembangunan yang dilaksan kelurahan yang dilaksan sebalum pembangunan yang dilaporkan masyaraka	Jsulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	10,00 %
srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelunahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan akneunahan jan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel pemerintah tingkat atas untuk dibayai akneunahan (RPIDMX) Ada dalam Musrenbangdes/kel pemerintah tingkat atas untuk dibayai akneunahan sebas dalam APPS maupun sumber biaya dan perusahaan sevasta yang investasi di akneunahan yang diusukkan mesyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalasaikan dalam APPS-Desa, becarih katupatan yang diusukkan mesyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesual dengan di kusrenbang becarih katupatan yang diusukkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesual dengan di kusrenbang halah kegalatan yang dibakan dalam pelaksanaan perubangunan fisik di desa dan kelurahan sesual hasil Musrenbang malah kegalatan yang dibakatan dalam pelaksanaan perubangunan fisik di desa dan kelurahan sesual hasil Musrenbang malah penduduk yang dibakat dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah akakeuntahan sesual kabupaten/kota masyarakat dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah akakeuntahan sesual akabupaten/kota proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah akakeuntahan sesual akabupaten/kota proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah akakeuntahan sesual katupan dalam APB-Desah kerjadahan segalatan yang dilaksanakan oleh paka kerjada tanga mangarakatan masyarakatan sesual kesalam sesual katupan dalam APB-Desah dalam akabupaten/kota pendakatungan dalam akabupaten/kota pendakatungan dalam		19,00 %
milklan dokumen Rencona Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) milklan dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RKPD/K) milklan dokumen beal Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusukan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai Adal ankikurahan milah kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa. 10. kegiatan malah kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa. 10. kegiatan milah kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan di kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan di kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan di kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan diah kegiatan yang diusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan diaha kegiatan yang dilabakan diahan pelaksanaan proyek padat karaya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah diahap enduduk yang dilabakan diahan pelaksanaan proyek padat karaya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah diahap dilabakan diaham pelaksanan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah oleh ketapan diaham APB-Daerah oleh pengelolah yang masuk desa/kelurahan oleh pungangan yang masuk desa/kelurahan oleh pungangan yang masuk desa/kelurahan yang disetuju menjadi Rencana Kerja Desa/kelurahan disepakati masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah oleh pungangan yang masuk desa/kelurahan yang disetuju menjadi Rencana Kerja Desa/kelurahan disepakati masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah oleh pungangan yang masuk desa/kelurahan yang disetuju menjadi Rencana Kerja Desa/kelurahan disepakati masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah disepakan yang disebagai pengelah yang disebagai pengelah yang belaksanakan	Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	20,00 %
Inlikan Bencans Pernbangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) IAPBO Kah/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan awasta yang investasi di aka-kelurahan milah kegiatan yang disusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, Bobarah Kahaputarin/Kota dan Provinsi alah kegiatan yang disusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan iniah kegiatan yang disusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan iniah kegiatan yang disusukan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan iniah penduduk yang dilibakan dalam pelaksanaan permbangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasii Musrenbang aniah penduduk yang dilibakan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah aka-kelurahan dalam APB-Desa dilahu sebagatah yang dilikasanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai etapan dalam APB-Desa dilahu pengelolahun yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Desa halahu pengelolahun yang dilaksanakan berja Desa dan Kelurahan dalam APB-Desa dan kelurahan dalam APB-Desa dan kelurahan dalam APB-Desa dan kelurahan besa dan kelurahan yang diseluju imengiai Rencana kerja Desa dan kelurahan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah Ada akasana sebelumnya diselasankan didesa dan kelurahan daham pengelakan dari masyarakat untuk mengelakan dari masy	Jsulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Ada ABD Kah/Kaca, APDD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di sa/kelurahan milah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa. B-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi milah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan 0. kegiatan milah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan 0. kegiatan milah masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,000 % milah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah 20,000 % makakelurahan atau kabupater/kota mang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Deerah 0 kegiatan milah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Deerah 0 kegiatan milah kegiatan yang masuk desa/kelurahan diluar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 2,00 % dilah masyarakat yang disekuntahan yang disebuju mengal Rencana Kerja Desa dan Keburahan 35,00 % dilah masyarakat yang disebuju mitak dilaksanakan dilak ada dan kelurahan yang disebuju mitak dilaksanakan dilak ada nelebahan oleh masyarakat yang dibahas saat yang dibahas dibahasanakan dilaksanakan dibahasanakan dibahasan	Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	
i APBD Kah/Kota, APBD Provinsi dian APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di aka/kelurahan mak/kelurahan mak/kelurahan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa. Bi-Desarih Kabupaten/Kota dan Provinsi di Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan di kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan di kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan di kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang miah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang miah penduduk yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai daspan dalam APB-Desa miah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Derah miah kegiatan yang dilaksanakan oleh pilak ketiga tanpa melabatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Derah miah kegiatan yang disekupilu menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan di Luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 200 % dilah Pemerintah Desa dan Kelurahan di Luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 200 % dilah Pemerintah besa dan Kelurahan di Luar yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan unsyawarah desa/kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan unsyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah dalah pembangunan yang disebagai dan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah dalaksanakan di desa/kelurahan vengada kepala Desa/Lurah miah kasus pernjimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang disebasikan secara hukum 1 kasus pernjimpangan pelaksanaan depaksanah kegiatan pembangunan yang disebasikan pemerint	Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
B-Baerafi Kabupaten/Kota dan Provinsi 0 kegiatan 0 kegiatan yang disualkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan 0 kegiatan 0 kegiatan	Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelastarian Hasil Pembangunan mlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang mlah penduduk yang dilibatkana dalam pelaksanaan proreyk padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah as/kelurahan atau kabupaten/kota mlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah mlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah mlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah mlah kegiatan yang masuk desarkelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Jan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan kelurahan Jan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Resa dan kelurahan oleh masyarakat Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Resa dan kelurahan oleh masyarakat Jalan Pemerintah disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Jaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh Jaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh Jaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menpelaksanaan pembangunan yang diselesaikan secara hukum Jaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menpelaksanaan pembangunan yang diselesaikan secara hukum Jaksaus sebelumnya. Jaksaus sebelumnya. Jaksaus sepanyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan pemerintah desa/kelurahan Jaksaus sepanaman kegiatan pembangunan yang didanah pemerintah desa/kelurahan Jaksaus	Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	10 . kegiatan
mlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,00 % miniah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang dilunjuk pemerintah 200,00 % miah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai tetapan dalam APP-Desa miah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APP-Desa miah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 35,00 % alan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 35,00 % alan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat sesuai keturahan untuk menjadi serupi untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat atau lembang ana untuk menjadi kasanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh akasanaa kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh akasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan desa/kelurahan oleh kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan (basus benyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan (basus masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan (basus masyarakat di kelurahan yang diselesaikan secara hukum di kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan (basus dan kelurahan yang didanai dari APB Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan yang diselesaikan secara hukum di kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan yang diselesaikan di desa dan kelurahan yang d	Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan nasil Musrenbang	0 . kegiatan
mlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang 320,00 % miniah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang dilunjuk pemerintah 200,00 % miah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai tetapan dalam APP-Desa miah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APP-Desa miah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 35,00 % alan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 35,00 % alan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat sesuai keturahan untuk menjadi serupi untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat atau lembang ana untuk menjadi kasanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh akasanaa kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh akasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan desa/kelurahan oleh kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan (basus benyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan (basus masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan (basus masyarakat di kelurahan yang diselesaikan secara hukum di kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan (basus dan kelurahan yang didanai dari APB Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan yang diselesaikan secara hukum di kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan yang diselesaikan di desa dan kelurahan yang d		
mlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah azikelurahan atau kabupaten/kota arakelurahan atau kabupaten/kota arakelurahan atau kabupaten/kota arakelurahan adau kabupaten/kota arakelurahan adau kabupaten/kota arakelurahan adalam APB-Desa mlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah nlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah nlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah nlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah nlah kegiatan yang dilaksanakan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Jalan mencana kerja program dan kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan rencana kerja program dan kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan rencana kerja program dan kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan tencana kerja program dan kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah Jaksananan kegiatan dari masyarakat untuk melepaksakana pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga Jaksananan kegiatan dari masyarakat untuk melaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jahak kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jaksus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jaksus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jakasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jakasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jakasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaik	<u> </u>	220.00%
lankekupatan atau kabupaten/kota miah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai miah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah miah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah miah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Jalan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah babupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat sakanaanan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksana sebelumnya miah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepaja Desa/Lurah miah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan dit ingkat desa/kelurahan O kasus miah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum T kasus sis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang diselesaikan desa/kelurahan S kegiatan miah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan S kegiatan miah kegiatan gang di dasa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota S kegiatan miah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota S kegiatan miah kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan ruma	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
etapan dalam APB-Desa milah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah milah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah milah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 2,00 % Jalan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 35,00 % Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan 35,00 % Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat yelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah Ada aksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksana sebelumnya. Ada Ada aksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksana sebelumnya. 0 kasus malah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakatan disesa/kelurahan kepada kepala Desa/Lurah milah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan 1 kasus sis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan 1 kasus milah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan milah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Derah Kabupaten/Kota 5 kegiatan milah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Derah Kabupaten/Kota 5 kegiatan milah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Derah Kabupaten/Kota 5 kegiatan 100 buah 100 buah 100 buah 100 orang 100 darah yang didanai dari	lesa/kelurahan atau kabupaten/kota	200,00 %
mlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang 2,00 % Jalan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan 35,00 % Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan 35,00 % Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat 5,00 % srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat yang dibahas saat 5,00 % srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat yang dibahas saat segagaran musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah a kasanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksana sebelumnya. Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada A	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa	
Jalan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Jalan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat yelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah aksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksana sebelumnya. Maha kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah milah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan nalah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan nalah kasus penyimpangan pelaksanaan hegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan nalah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan nalah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan nalah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota 5 kegiatan nalah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Drovinsi 7 kegiatan nalah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN Semangat Kegotongroyongan Penduduk nalah penduduk menjadi orang tua asuh a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan handa handa atidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangan handa handa atidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangan ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada a tidaknya kegiatan gotong r		
Jalan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan 35,00 % Jalan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/Kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat nyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah aksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksanas sebelumnya. Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada A		
ulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat srenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat yang dibahas saat syrelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah akasana sebelumnya. Ada aksana sebelumnya. Ada aksana sebelumnya. Alah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah mlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan 0 kasus mlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan 0 kasus mlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum 1 kasus is kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan 5 kenis mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Derah Kabupaten/Kota 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Derah Kabupaten/Kota 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD provinsi 7 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBN 6 kegiatan yang didanai dari APBN 7 kegiatan yang didanai dari APBN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>'</u>
srenbang dari diserujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat myelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah aksana sebelumnya. Ada aksana sepujimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakat desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah nilah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Alah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diskordinasikan pemerintah desa/kelurahan A laksus balah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diskordinasikan pemerintah desa/kelurahan A laksus balah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Desarah Kabupaten/Kota Alah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Derovinsi Alah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN Semangat Kegotongroyongan Penduduk Ada Aida atidaknya kegiatan di dara dara sehat Ada Ada atidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada atidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas umum dan fasilitas Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada A	Jsulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat	<u> </u>
Ada aksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh aksana sebelumnya. Mah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah (1) kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan (1) kasus malah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum (1) kasus malah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum (1) kasus malah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan (5) kegiatan malah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan (1) kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan (1) kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan (1) kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota (1) kegiatan malah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota (1) kegiatan (1) kegi	Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	
Ada aksana sebelumnya. mlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga nasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah mlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan nlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum 1 kasus mlah kagus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum 1 kasus mlah kagiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikordinasikan pemerintah desa/kelurahan 5 Jenis mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan didaknya kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan da tidaknya kegiatan gotongroyong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiaraan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Tidak a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Tidak	308	Ada
masyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah mlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan mlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum 1 kasus mis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan sis kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota s kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi s kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN s kegiatan mlah kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus at didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada	pelaksana sebelumnya.	
mlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum 1 kasus sis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan 5 Jenis mlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kelomgok arisan mlah penduduk menjadi orang tua asuh 6 tidaknya dena sehat 7 kada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian sawah dan kebun 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan 8 tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ket	kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
sis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan 5 Jenis mlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota 5 kegiatan 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 7 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan mlah kegiatan dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan mlah kegiatan dan kegiatan mlah kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	<u> </u>
mlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan 5 kegiatan mlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota 5 kegiatan 7 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 7 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 8 kegiatan dan dan da	Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	
nlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 8 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 didah panduduk menjadi orang tua asuh 6 didaknya dana sehat 6 didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah 6 di didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah 7 da da di didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus 7 dala didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas 7 dala didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha 7 didak 7 dala didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun 7 dala didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 7 didak 7 dala didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 8 didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya 8 didaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya		<u> </u>
nlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi 7 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 6 desa dan kelurahan yang didanai APBN 5 kegiatan 7 do orang 6 dan kelurahan yang didanai APBN 7 dan 8 dan 4 dan 8 dan 4 dan 8 dan 4 dan 8 dan	<u> </u>	<u> </u>
Semangat Kegotongroyongan Penduduk mlah kelompok arisan mlah kelompok arisan mlah penduduk menjadi orang tua asuh a tidaknya dana sehat a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	<u> </u>	ļ ·
Semangat Kegotongroyongan Penduduk mlah kelompok arisan mlah penduduk menjadi orang tua asuh a tidaknya dana sehat a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada		
mlah kelompok arisan mlah penduduk menjadi orang tua asuh a tidaknya dana sehat a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada		
mlah penduduk menjadi orang tua asuh O orang at idaknya dana sehat Ada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah Ada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah Ada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus Ada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sial/prasarana dan sarana Ada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha Tidak at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Tidak at idaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	ı
a tidaknya dana sehat a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemperian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	Jumlah kelompok arisan	
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	+ -
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	•	
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada		
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sial/prasarana dan sarana a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tahah Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun Ada a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya Tidak a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas	
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada	sosial/prasarana dan sarana	
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada		
a tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan Ada		
a traditriya kegiatan gotong royong ataa sambatan/sejenisnya dalam penstiwa kematian ————————————————————————————————————	Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
a tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan Ada	Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada

Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan ingkungan lainnya	Ada
	Ada
I. Adat Istiadat	latics.
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
lumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
lumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
lenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	2 jenis
lenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
lenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan	,
kasus aparat K17KW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan ilai, pemerasan dan Bejenisnya.	0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dibernentikan dengan normat karena kena kasus pungutan ilar, pernerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
	U Kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	0
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan ain	0
tos Kerja Penduduk	
uas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	0
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
lumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
lumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat	0
relaparan dan kekeringan	
	
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat	0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	0 0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	0 0 0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	0 0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	0 0 0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi desulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	0 0 0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Kebiasaan masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Kesulitan yang dihadapi masyarakat KIII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN KEBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	0 0 0 0 0 0 0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Kesulitan yang dihadapi masyarakat KIII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LI LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN	0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak Jenis
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Lesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN Kepengurusan	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Lesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN Kepengurusan Buku Administrasi	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Lesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN Kepengurusan	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Kesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN Kepengurusan Buku Administrasi Jumlah kegiatan	0 0 0 0 0 0 0 0 Tidak Jenis Ada Aktif/tidak Jenis 1 Jenis
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan bangan/kelaparan/gagal panen Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi Lesulitan yang dihadapi masyarakat KII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK Jumlah kegiatan B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN I. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN Kepengurusan Buku Administrasi	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
3. KELOMPOK TANI/NELAYAN	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
ournan kegutun	O OCTIO
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	2
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	3
XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 6.781.546.793,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 1.555.000.000,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 285.346.293,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 100.000.000,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 1.442.707.000,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 227.821.500,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 1.655.336.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp 1.505.336.000,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 10.000.000,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 1.913.431.000,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 1.894.429.856,00
7	<u>'</u>
P. Dartonggungiawahan Kanala Dasa / Lurah	
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	Ta .
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	2 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	0 kasus
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	13 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Tidak Ada
тыры	Hadis Add
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	2 huah
	2 buah
Jumlah meja	44 buah
Jumlah kursi	193 buah
Jumlah almari arsip	24 buah
Komputer	13 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	1 unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah Kas Desa	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah	Ada dan Terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada
вики Laporan Pengaduan Masyaraкat Buku Agenda Ekspedisi	
	Ada dan Terisi

Buku Profil Desa dan Kelurahan Buku Data Induk Penduduk Buku Data Mutasi Penduduk Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan Buku Registrasi Pelayanan Penduduk Buku Data Penduduk Sementara	Ada dan Terisi
Buku Data Mutasi Penduduk Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Tidak Ada
	Ada dan Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Tidak Ada
Buku Anggaran Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Kas Umum	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Ada dan Terisi
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	0
-	<u> </u>
Jumlah ruang kerja	1 Ruang
Balai BPD	0 - 0
Listrik	0
Air bersih	0
Telepon	0
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	1
Jumlah mesin tik	0 buah
Jumlah meja	2 buah
Jumlah kursi	7 buah
Jumlah almari arsip	1 buah
Komputer	1 unit
Mesin fax	0 unit
INICOLITICA	Outilit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	1
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	0
	0
Buku kegiatan BPD	I
Buku himpunan peraturan desa	1
Buku Lainnya	0
·	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	
	Jenis
l lenis kediatan	Jenis
Jenis kegiatan	
Jumlah pengurus	Orang
•	
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja	Orang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Orang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Orang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Orang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Orang Ruang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan	Orang Ruang
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Orang Ruang Ada Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Orang Ruang Ada Ada Tidak
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan	Orang Ruang Ada Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing umlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masingmasing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masingmasing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masingmasing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masingmasing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masingmasing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masingmasing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan dan perangkat masing-masing	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatara yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 6 jenis 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kali 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan pengkaitan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penangganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan dena dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan ata penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan desa dan kelurahan penghargaan pemerintahan desa dan kelurahan penghargaan pemerintahan desa dan kelurahan pemerintahan d	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kali 0 kali
Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kali 0 kali
Jumlah pengurus Jumlah ruang kerja D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan desa dan kelurahan pengkaitan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penangganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatar prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilaksanakan pemerintahan dena dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan ata penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pemerintahan desa dan kelurahan penghargaan pemerintahan desa dan kelurahan penghargaan pemerintahan desa dan kelurahan pemerintahan d	Orang Ruang Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kali 0 kali

Marieta and a second description of the seco	0::-
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	la
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	0 jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	0 jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	0 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	1 jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	0 jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	0 jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	0 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	0 jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	0 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	0 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	0 kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	1 kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	0 kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	0 kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	0 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	0 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	0 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	1 kali

KAB. BANTUL, 12 Juni 2025 PANJANGREJO Kecamatan PUNDONG Kabupaten KAB. BANTUL

- Tembusan : 1. Camat PUNDONG 2. Bupati KAB. BANTUL 3. Arsip